

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan *Good Governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggung jawaban suatu instansi atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah di tuangkan dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pekerjaan umum dan penataan Ruang kota Bogor merupakan suatu instansi pemerintah yang bergerak di bidang perbaikan, pembangunan serta pengawasan fasilitas yang ada di kota Bogor dengan hal ini lah Dinas PUPR membuat Laporan Kinerja sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa percaya dan juga bisa menilai bagaimana kinerja dari Dinas PUPR.

Retribusi Dinas PUPR Kota Bogor terdiri dari pendapatan sewa alat berat dan pengelolaan limbah yang akan di alokasikan untuk kegiatan operasi baik itu belanja langsung, belanja tidak langsung dan kebutuhan lainnya. Belanja langsung yang dilakukan oleh Dinas PUPR selama tahun 2017 berjumlah Rp.196.564.595.457 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 80,29 %, Tahun 2018 berjumlah Rp.212.086.070.349 dengan jumlah capaian kinerja fisik sebesar 90,35 %, Tahun 2019 berjumlah Rp.210.335.622.564,00 dan belanja tidak langsung selama tahun 2017 Rp.6.187.703.348 dengan persentase penyerapan 32,84% tahun 2018 berjumlah Rp.7.057.018.588 dengan persentase penyerapan 90,64%, tahun 2019 dengan Rp.16.279.052.926 dengan persentase penyerapan 90,84% untuk keseluruhan memiliki kategori cukup baik

Dengan penjabaran di atas dapat di simpulkan bahwa laporan kinerja adalah sebuah keharusan di miliki oleh setiap instansi pemerintah dan laporan tersebut harus bersifat transparansi agar masyarakat tahu bagaimana kinerja instansi tersebut dari tahun ketahun dan rencana apa saja yang telah di kerjakan, oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis Laporan kinerja yang di buat oleh Dinas PUPR. sehingga penulis mengambil judul penelitian “**Analisis Pemanfaatan Anggaran dan Evaluasi Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor**”.



## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada laporan tugas akhir ini adalah, sebagai berikut ini :

1. Bagaimana proses penyusunan anggaran di Dinas PUPR?
2. Bagaimana realisasi anggaran di Dinas PUPR?
3. Bagaimana evaluasi anggaran di Dinas PUPR?

## 1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang timbul sehingga terdapat tujuan penulisan laporan tugas akhir ini sebagai berikut ini:

1. Menganalisis proses penyusunan anggaran di Dinas PUPR.
2. Menganalisis realisasi anggaran di Dinas PUPR.
3. Menganalisis evaluasi anggaran yang dilakukan oleh Dinas PUPR.

## 1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagi penulis  
Laporan ini bisa menjadi media belajar bagi penulis untuk menyamakan teori dan praktik yang ada di lapangan nanti, bisa menambah wawasan dalam bekerja dan berinteraksi secara langsung di lingkungan kantor.
2. Bagi lembaga yang terkait  
Laporan ini bisa menjadikan review bagi lembaga baik dari swasta maupun pemerintah yang menyediakan jasa pembangunan.
3. Bagi pembaca  
Laporan ini bisa menjadikan bahan tambahan dalam hal informasi dan juga referensi bagi pembaca, dan juga bisa menjadi acuan bahan pembelajaran kedepannya.